BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penulis di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I:

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I adalah basis akrual (*accrual bassis*).
2. Klasifikasi aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I terdiri atas: (a) tanah, (b) peralatan dan mesin, (c) gedung dan bangunan, (d) jalan, irigasi, dan jaringan.
3. Pengakuan aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Aset diperoleh melalui donasi dan bukan dari donasi (pembelian) secara tunai atau angsuran.
4. Pengukuran aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi

untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas aset atau investasi tersebut. Pengukuran aset tetap diperoleh dengan harga beli ditambah pajak serta ditambah dengan biaya-biaya yang diperlukan sampai aset tetap tersebut dipakai pertama kali.

5. Pencatatan aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I menggunakan sistem aplikasi yaitu SIMAK BMN. Pencatatan pada SIMAK BMN dengan cara menginput dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan mutasi barang (SPK; kuitansi; faktur; SPM/SP2D; BAST; dokumen kepemilikan; surat keterangan penghapusan) setelah itu dilakukan proses dan menghasilkan *output* berupa data perolehan BMN; perubahan BMN; penyusutan BMN; dan penghapusan BMN.
6. Penyajian aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I disajikan dalam laporan keuangan neraca dan tidak dibuat laporan keuangan laba rugi. Karena dalam pemerintahan membuat laporan keuangan hanya untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I memiliki keterbatasan penelitian yaitu tidak semua data yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah serta tidak adanya jurnal yang ditulis secara manual.

5.3. Saran

Saran yang diusulkan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I adalah sebagai berikut:

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I melakukan pencatatan menggunakan SIMAK BMN yang telah ditentukan oleh Kemenkeu, aplikasi SIMAK tidak memadai penjurnalan, sehingga jurnal dibuat secara manual. Aplikasi tidak sepenuhnya benar, jadi seharusnya juga ditambah dengan pencatatan secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

Aggestam, Caroline. 2010. *A Project Management Perspective on The Adoption of Accrual- Based IPSAS. International Journal of Governmental Financial Management.*

Arif, Bahtiar., Muchlis dan Iskandar. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Kusufi, Syam Muhammad. 2012. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Daerah Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Martani, Dwi., Veronica, NPS Sylvia., Wardhani, Ratna., Farahmita, Aria dan Tanujaya, Edward. 2012. *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH Berbasis PSAK Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi., Putra, Sondi Iswahyudi. Rahmawati, Maulidah. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia, 2010. Standar Akuntansi Pemerintah- Peraturan Pemerintah Nomor 71. Jakarta: Salemba Empat.